



Warga Terpaksa Menahan Nyeri

■ 159.707 Orang di DIY Dicoret dari Kepesertaan PBI-JK

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 159.707 warga Daerah Istimewa Yogyakarta dicoret dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per Januari 2026, berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) DIY. Kondisi ini memicu kebingungan di tengah masyarakat, yang merasakan pelayanan kesehatannya menjadi terganggu.

Kabupaten Gunungkidul mencatatkan jumlah penonaktifan tertinggi, yakni sebanyak 56.087 jiwa, disusul Kabupaten Sleman dengan 34.143 jiwa, dan Kabupaten Bantul sebanyak 31.965 jiwa. Sementara itu, di Kota Yogyakarta tercatat 22.304 peserta nonaktif, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 15.208 peserta. Adapun jumlah peserta PBI JK yang

Sangat disayangkan ada kejadian seperti ini, karena tiba-tiba (PBI) nonaktif saat sedang dibutuhkan.

● ke halaman 7

KEHILANGAN BANTUAN

159.707
Sebanyak 159.707 warga Daerah Istimewa Yogyakarta dicoret dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per Januari 2026.

Kabupaten Gunungkidul mencatatkan jumlah penonaktifan tertinggi, yakni sebanyak 56.087 jiwa, disusul Kabupaten Sleman dengan 34.143 jiwa, dan Kabupaten Bantul sebanyak 31.965 jiwa.

Sementara itu, di Kota Yogyakarta tercatat 22.304 peserta nonaktif, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 15.208 peserta.

Adapun jumlah peserta PBI JK yang masih berstatus aktif di DIY per Januari 2026 mencapai 1.608.624 jiwa.

Bantuan PBI-JK diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penonaktifan tersebut merupakan konsekuensi dari pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial (Kemensos), mengacu pada peringkat kesejahteraan (desil) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Warga Terpaka

● Sumbung Wali

mausi berstatus aktif di DIY per Januari 2026 mencapai 1.008.624 jiwa. Joko Nugroho, warga Kotagede, Kota Yogya, termasuk di antara warga yang mendadak terdepak dari daftar peserta PBI-JK. Bagi Joko, kabar itu lebih sedih di samping karena dirinya harus menjalani kontrol rutin terkait riwayat penyakit katarak yang dideritanya. Bahkan, operasi mata yang sebelumnya sempat batal lantaran kebulatan kerja, tengah dipevulkan ulang bersama dokter spesialis yang menganiayanya.

"Semoga BPJS saya aktif lagi, karena berat kalau harus membayar mandiri. Biaya kontrol saja sekitar 150 ribu, terus operasi katarak bisa sampai Rp7 jutaan," katanya, Jumat (6/2).

Hanni, warga Tegayutro, juga mengaku sempat dinonaktifkan status PBI-nya saat hendak kontrol kesehatan dan cucu darah (hemodialisis/HD) di rumah sakit pada pekan lalu. Saat itu ia mengaku kelimpungan, lantaran biaya-biaya biaya Rp1,5 juta yang harus dikeluarkan untuk sekali cucu darah, langsung menanti di dalam kepala-nya. Bagaimana tidak, jika ditalikan dua dalam seminggu, ia harus merogoh kocek hingga Rp2,6 juta, sebuah nominal yang terbilang berat untuk dianggarkan kantongnya.

"Lihatnya saya menampuk bukan bermaksud mendahului, tapi itu dampaknya bisa sampai kematian. Makanya, saya langsung gercep memprotes," ujarnya.

Diobati mandiri
Lain cerita dengan Agi (nama disamarkan), warga Kalasan, Kabupaten Sleman, yang kini mengidap tumor payudara. Perempuan 39 tahun itu, terpaksa harus menahan nyeri di bagian dada karena tidak bisa mengakses layanan kontrol di rumah sakit setelah statusnya sebagai PBI dinonaktifkan.

"Kemarin mau kontrol enggak jadi. Sementara cuma dabal sendiri. (Periksa) tertunda. Jadi int (lagi) mengurus aktivitas) sendiri bukan saki juga. (Sakitnya) nyeri, seperti ditark nyerinya," kata Agi, ketika mengurus dokumen untuk pengaktifan kembali BPJS Kesehatan di Kantor Dinas Sleman, Jumat.

Lebih banyak
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmihartih, mengakui bahwa gelombang penonaktifan kali ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa perubahan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi faktor utama.

"Tahun lalu (2025) kan ada, cuma 7.000-an. Ini lebih banyak lagi," ujar Endang di Kompleks Kepati-

han, Yogyakarta, Jumat. Endang menjelaskan, penonaktifan tersebut merupakan konsekuensi dari pemutakhiran data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang kini berfokus pada pertanggungjawaban kesejahteraan. Kondisi ini mengakibatkan kepanikan di tingkat bawah. Endang menerima laporan bahwa kantor kepala Dinas Sosial di kabupaten/kota mulai didatangi warga yang memprotes hilangnya jaminan kesehatan mereka secara tiba-tiba. Merespon situasi ini, Endang meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk bertindak proaktif dan tidak menunggu. Ia mendesak agar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dinas terkait segera turun ke lapangan untuk mengecek kondisi riil warga yang tercoret dari daftar.

Gagal fisioterapi
Ngdiyem (65), kini kelengkapan memobati penyakit saraf kejepti di kakinya tanpa PBI-JK. Perempuannya lanjut usia (lusa) asal Padukuhan Pongaganan, Kalurahan Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo ini baru tahu bahwa ia tidak bisa menggunakan PBI-JK pada Jumat (6/2) pagi ketika hendak melakukan fisioterapi di RSUD Wiyadigra Serang (NASS) Sentolo.

Saat sedang menunggu fisioterapi, ia dipanggil petugas dan diberitahu bahwa kepesertaan PBI-JK miliknya sudah nonaktif. Petugas lalu menyarankan agar Ngdiyem menggunakan layanan umum tanpa PBI-JK. Untuk itu, Ngdiyem harus membayar Rp120.000, belum termasuk obat. Sedangkan, saat ini ia sedang tidak membawa uang sama sekali untuk membayar layanan medis.

"Akhirnya saya gagal terapi, dirarakan untuk menunggu ulang PBI-JK di kalurahan. Ujar perempuan itu.

Ngdiyem mengaku kebingungan karena tiba-tiba saja mendapat informasi bahwa status PBI-JK miliknya sudah non aktif. Padahal selama ini ia selalu mengonfirmasinya untuk mendapatkan pelayanan medis. Penyakit saraf kejepti itu membuatnya tidak bisa berjalan kaki dalam durasi lama. Ia juga perlu penanganan untuk hipertensinya.

Belakangan, diketahui PBI bahwa status PBI non-aktif juga terjadi pada sang suami, Pujawan (80). Padahal, Pujawan menderita hipertensi dan nyeri di bagian lutut. Yuni, anak Ngdiyem dan Pujawan, kini terpaksa harus sibuk mengurus reaktivasi PBI-JK miliknya sendiri.

Yuni menyampaikan kekecewaan yang menimpa orang tuanya itu, sebab tidak disertai pemberitahuan sama sekali. "Sangat disayangkan ada kejadian seperti ini, karena tiba-tiba (PBI) nonaktif saat sedang dibutuhkan," kata Yuni.

ABK Jalar
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya, Emma Rahmi Azyati, mengungkapkan, meski otoritas aktivasi berada di tangan BPJS Kesehatan, Pemkot berkeras dengan mengalihkan peserta yang tercoret tersebut menjadi penduduk yang dibayai pemerintah daerah (PDPA) melalui dana APBD.

"Asalkan mau di kelas tiga, dan yang bersangkutan statusnya bukan pekerja, karena pekerja menjadi tanggungan pemberi upah,"

tanpanya. Kabar baiknya, proses aktivasi kini jauh lebih cepat, karena Universal Health Coverage (UHC) yang disandang Kota Yogyakarta membuat aktivasi kar- ti hanya memakan waktu sekitar satu jam. Prioritas utama pun diberikan bagi kondisi darurat, seperti pasien hemodialisis maupun kemoterapi agar jadwal pengobatan mereka tidak terganggu.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogya, Waryono, mem-
bahkan, Wali Kota Hasto Wardoyo, telah memberikan instruksi khusus supaya masalah ini ditangani secepat. Akan tetapi, jika di dalam Kartu Keluarga (KK) masih berstatus karyawan swasta, data tersebut harus diperbarui terlebih dahulu di Dishkopti.

"Tetapi data sudah sesuai, bisa dicek secara berkala melalui JKN Mobile atau aplikasi. Pandawa milik BPJS Kesehatan," tegasnya.

Pemkot Yogyakarta sudah menyiapkan dana sekitar Rp44 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Waryono menyampaikan, alih-kali tersebut dapat meng-cover jaminan kesehatan warga yang rilainya masih bisa disesuaikan jika kebutuhan mendesak.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Maskin (PFM) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kebutuhan Layanan Kesehatan anbag warga miskin.

Bupati Sleman, Haris Kuswanto, mengaku telah membuka perdulahan bagi warga yang kehilangan akses-pengobatan karena kebijakan penonaktifan. "Tiga saring mana warga kami yang memang punya kebutuhan sosial karena penyakitnya atau hal lain, kami utamakan. Kami tangung," kata Haris, saat menerima langsung layanan di kantor Dinas Sosial Sleman, Jumat.

Status peserta PBI-JK APBD yang nonaktif rencananya akan dihalikan ke PBI APBD. Namun demikian, terkait kuota, Haris mengaku belum mengatahui.

"Kita data dulu orangnya. Nanti membutuhkan uang berapa kita ushakan agar bisa mampu. Teman-teman di Dinas sudah segera melakukan pendafaran bagi warga kami yang kemarin dinonaktifkan, supaya tidak ada kesulitan. (Prioritas) yang sakit dulu dan membutuhkan penanganan prioritas, apapun bentuknya. Keuangan daerah saya alih-hal harus mampu. Nanti kalau kurang ya ditambah," kata Haris.

ABK Jalar
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya, Emma Rahmi Azyati, mengungkapkan, meski otoritas aktivasi berada di tangan BPJS Kesehatan, Pemkot berkeras dengan mengalihkan peserta yang tercoret tersebut menjadi penduduk yang dibayai pemerintah daerah (PDPA) melalui dana APBD.

"Asalkan mau di kelas tiga, dan yang bersangkutan statusnya bukan pekerja, karena pekerja menjadi tanggungan pemberi upah,"

tanpanya. Kabar baiknya, proses aktivasi kini jauh lebih cepat, karena Universal Health Coverage (UHC) yang disandang Kota Yogyakarta membuat aktivasi kar- ti hanya memakan waktu sekitar satu jam. Prioritas utama pun diberikan bagi kondisi darurat, seperti pasien hemodialisis maupun kemoterapi agar jadwal pengobatan mereka tidak terganggu.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogya, Waryono, mem-
bahkan, Wali Kota Hasto Wardoyo, telah memberikan instruksi khusus supaya masalah ini ditangani secepat. Akan tetapi, jika di dalam Kartu Keluarga (KK) masih berstatus karyawan swasta, data tersebut harus diperbarui terlebih dahulu di Dishkopti.

"Tetapi data sudah sesuai, bisa dicek secara berkala melalui JKN Mobile atau aplikasi. Pandawa milik BPJS Kesehatan," tegasnya.

Pemkot Yogyakarta sudah menyiapkan dana sekitar Rp44 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Waryono menyampaikan, alih-kali tersebut dapat meng-cover jaminan kesehatan warga yang rilainya masih bisa disesuaikan jika kebutuhan mendesak.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Maskin (PFM) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kebutuhan Layanan Kesehatan anbag warga miskin.

Bupati Sleman, Haris Kuswanto, mengaku telah membuka perdulahan bagi warga yang kehilangan akses-pengobatan karena kebijakan penonaktifan. "Tiga saring mana warga kami yang memang punya kebutuhan sosial karena penyakitnya atau hal lain, kami utamakan. Kami tangung," kata Haris, saat menerima langsung layanan di kantor Dinas Sosial Sleman, Jumat.

Status peserta PBI-JK APBD yang nonaktif rencananya akan dihalikan ke PBI APBD. Namun demikian, terkait kuota, Haris mengaku belum mengatahui.

"Kita data dulu orangnya. Nanti membutuhkan uang berapa kita ushakan agar bisa mampu. Teman-teman di Dinas sudah segera melakukan pendafaran bagi warga kami yang kemarin dinonaktifkan, supaya tidak ada kesulitan. (Prioritas) yang sakit dulu dan membutuhkan penanganan prioritas, apapun bentuknya. Keuangan daerah saya alih-hal harus mampu. Nanti kalau kurang ya ditambah," kata Haris.

ABK Jalar
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya, Emma Rahmi Azyati, mengungkapkan, meski otoritas aktivasi berada di tangan BPJS Kesehatan, Pemkot berkeras dengan mengalihkan peserta yang tercoret tersebut menjadi penduduk yang dibayai pemerintah daerah (PDPA) melalui dana APBD.

"Asalkan mau di kelas tiga, dan yang bersangkutan statusnya bukan pekerja, karena pekerja menjadi tanggungan pemberi upah,"

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005